



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2004 telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu disiapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
9. Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2004;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi penerimaan Kas Daerah.
6. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksud untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
9. Pengeluaran Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
10. Sisa Perhitungan Tahun Berkenan (Berjalan) adalah selisih lebih dari surplus / Defisit ditambah dengan komponen – komponen pembiayaan berupa penerimaan berupa Penerimaan Daerah dikurangi komponen – komponen Pembiayaan berupa Pengeluaran Daerah dalam Perhitungan APBD tahun anggaran tertentu.
11. Sisa Perhitungan tahun anggaran lalu adalah salah satu komponen pembiayaan berupa penerimaan Daerah yang merupakan hasil pemindah bukuan dari Sisa Perhitungan Anggaran Berkenaan.
12. Piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – perundangan berlaku.
13. Hutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – perundangan berlaku.
14. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi Keuangan Pemerintah Daerah berupa kekayaan (aktivitya) Daerah, Hutang Daerah dan Ekuitas Dana pada saat tertentu.
16. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aktivitya dengan jumlah hutang.

BAB II
REALISASI APBD TAHUN 2004

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2004, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 210.749.341.145,49	
2. Belanja	<u>Rp. 201.587.190.295,00</u>	
	Surplus/defisit	Rp. 9.162.150.850,49
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp. 20.701.211.597,90,-	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 543.007.934,00,-</u>	
	Surplus/defisit	Rp. 20.158.203.663,90

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 5.996.323.109,49 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan | Rp. 204.753.018.036,00 | |
| b. Realisasi | Rp. 210.749.341.145,49 | |
| | Selisih Lebih / Kurang | Rp. 5.996.323.109,49 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.16.145.181.486,90 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran belanja | Rp. 217.732.371.781,90 | |
| b. Realisasi | Rp. 201.587.190.295,00 | |
| | Selisih Lebih / Kurang | Rp. 16.145.181.486,90 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. (3.817.282.895,51) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------------|
| a. Surplus / defisit | Rp. (12.979.353.745,90) | |
| b. Realisasi | Rp. 9.162.150.850,49 | |
| | Selisih Lebih / Kurang | Rp. (3.817.282.895,51) |
- (4) Selisih penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan sejumlah
Rp. 9.162.150.850,49 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------|------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan | Rp. 20.701.211.597,90 | |
| b. Pengeluaran | Rp. 29.863.362.448,39 | |
| | Selisih Lebih / Kurang | Rp. 9.162.150.850,49 |

BAB III
NERACA DAERAH

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp. 659.018.358.242,16 |
| b. Jumlah Hutang | Rp. 1.610.688.826,50 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 657.407.669.415,66 |

(2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas Daerah sejumlah Rp. 29.320.354.514,39 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp.	20.701.211.597,90
b. Jumlah penerimaan Kas	Rp.	<u>210.749.341.145,49</u>
Jumlah	Rp.	231.450.552.743,39
c. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp.	202.130.198.229,00
d. Saldo Kas per 31 Desember 2005	Rp.	29.320.354.514,39

BAB IV LAMPIRAN PERHITUNGAN APBD

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : - Neraca Daerah
- Laporan Aliran Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 6

Lampiran – lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di L i w a
Pada Tanggal 25 Juli 2005

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR T.

DIUNDANGKAN DI LIWA
PADA TANGGAL 25 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

HELMY ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2005 NOMOR : 04

